

## **Strategi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam Pengoptimalan Pendidikan: Perspektif Ki Hadjar Dewantara**

**Purnama Sari<sup>1</sup>, Ainun Azzahra<sup>2</sup>, Hana Maula Khairani<sup>3</sup>, Salwa Waidah Arsaad<sup>4</sup>,  
Buyung Firmansyah<sup>5</sup>, Cepri Maulana<sup>6</sup>**

<sup>1,2,3,4,6</sup> Program Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas Pendidikan Indonesia

<sup>5</sup> Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Pendidikan Indonesia

e-mail: [purnamasari21@upi.edu](mailto:purnamasari21@upi.edu)

### **Abstrak**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Provinsi Jawa Barat untuk kelompok umur 16-18 pada tahun 2023 yang menunjukkan angka sebesar 68,58%. Jumlah angka ini lebih rendah dibandingkan dengan kelompok umur 13-15. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan strategi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pengoptimalan pendidikan di Jawa Barat melalui perspektif Ki Hadjar Dewantara. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan melakukan wawancara kepada Pemerintah Dinas Pendidikan Jawa Barat. Dalam hasil penelitian ini ditunjukkan bahwa upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pengoptimalan pendidikan adalah dengan cara memberikan program Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) dan Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU). Program ini sudah sesuai dengan konsep beasiswa menurut Ki Hadjar Dewantara. Jadi, dapat disimpulkan bahwa program ini memiliki dampak terhadap peningkatan angka partisipasi sekolah siswa jenjang SMA/Sederajat. Program BOPD dan BPMU juga menjadi program pendukung dalam mengoptimalkan dan mengefektifkan kebijakan wajib belajar 9 tahun.

**Kata kunci:** *Pendidikan, Pemerintah, Program*

### **Abstract**

This study was prompted by the School Participation Rates (APS) issue in West Java Province among 16-18-year-olds in 2023, indicating a rate of 68.58%, lower than the 13-15 age group. It aimed to elucidate the strategies of the West Java Provincial Government in optimizing education, framed through Ki Hadjar Dewantara's perspective. Employing a descriptive qualitative approach, interviews were conducted with the Head of the Information and Communication Technology Education Center at the West Java Education Office. The findings reveal that the government's efforts entail implementing assistance programs like BOPD and BPMU, in alignment with Dewantara's scholarship concept. Consequently, these programs are deemed to enhance school participation rates among high school equivalent

students. Additionally, BOPD and BPMU serve as complementary measures in optimizing and bolstering the effectiveness of the 9-year compulsory education policy.

**Keywords :** *Education, Government, Program*

## **PENDAHULUAN**

Indonesia adalah sebuah negara berkembang yang mempunyai lahan luas dengan berbagai wilayah dan pulau serta jumlah penduduk yang terhitung banyak. Menurut Badan Pusat Statistika (2023), populasi penduduk Indonesia yaitu terhitung sekitar 280,73 juta jiwa, sedangkan populasi penduduk di Provinsi Jawa Barat berada di angka 49,9 juta jiwa. Dengan populasi sebanyak itu, sudah seharusnya pemerintah menyoroti bidang pendidikan agar sumber daya manusia di Indonesia meningkat. Maka, Pemerintah memegang peran penting dalam bidang pendidikan di suatu negara agar dapat terciptanya berbagai inovasi, sehingga Indonesia menjadi negara maju melalui pendidikan yang berkualitas.

Berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2003 pada pasal 11 ayat dua menjelaskan bahwa pemerintah sudah seharusnya menjamin ketersediaan dana sehingga, pendidikan bagi warga negara yang berusia 7-15 tahun dapat terselenggara. Kemudian, Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Jawa Barat dalam Badan Pusat Statistika (2024), pada kelompok umur 13-15 yang menunjukkan minat terhadap sekolah dengan angka sebesar 95,75%. Namun, kelompok umur 16-18 pada tahun 2023 ditunjukkan dengan angka 68,58%, sehingga adanya penurunan motivasi belajar siswa yang berdampak pada rendahnya sumber daya manusia yang berkualitas di Jawa Barat. Dengan kata lain, Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum bisa mengoptimalkan pendidikan pada jenjang SMA/Sederajat.

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dapat ditingkatkan oleh pemerintah dalam bidang pendidikan di Indonesia, yaitu seperti menyalurkan program-program bantuan. Salah satunya dengan mengimplementasikan program bantuan tingkat pusat sampai tingkat daerah. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SMA/Sederajat Negeri dan Swasta, serta Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) untuk SMA, SMK, dan SLB Swasta. Program bantuan ini merupakan bentuk upaya pemerintah pusat dan provinsi untuk mendukung satuan pendidikan dan memfasilitasi sebuah layanan pendidikan yang berkualitas. Selain itu, sejak tahun 2019, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang melarang Iuran Bulanan Peserta Didik (IBPD) pada jenjang pendidikan. Sebaliknya, Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD), yang didanai oleh APBD Daerah Jawa Barat, diluncurkan. Program ini adalah upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menunjukkan fungsinya sebagai lembaga penyelenggara pendidikan (Barlian et al., 2023).

Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah proses tuntutan dalam proses pertumbuhan anggota masyarakat. Di samping itu, pendidikan menuntun siswa menjadi individu dan anggota masyarakat yang dapat mencapai kebahagiaan serta keselamatan (Pristiwanti, 2022). Maka, untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, pemerintah perlu segera membuat rencana terbaik untuk memberikan fasilitas kepada keluarga kurang mampu melalui bidang pendidikan. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah di bidang pendidikan tentunya sangat memengaruhi proses pembelajaran. Hal ini akan mempunyai

dampak pada Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai produk akhir dari kebijakan pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup yang lebih sejahtera (Santika, 2021).

Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik pemerintah dapat mengeluarkan program berupa beasiswa. Menurut Lahinta (dalam Ramadhon, 2017) beasiswa merupakan bantuan finansial yang diberikan oleh lembaga pemerintah, yayasan, atau perusahaan untuk membantu individu melanjutkan pendidikannya. Selain itu, menurut Astuti et al. (2019) tujuan utama pemberian beasiswa adalah untuk memajukan dunia pendidikan dan memberikan kesempatan yang sama. Maka dari itu, fasilitas yang baik akan dapat menunjang pembelajaran siswa dalam proses belajarnya. Beasiswa juga mendorong siswa untuk mempertahankan semangat belajar mereka sehingga mereka terus berprestasi dan bersemangat dalam menyelesaikan studi mereka. Hal ini sejalan dengan pemikiran Dewantara (2013), badan bantuan atau dalam hal ini pihak pemerintah harus dipergunakan sebagai badan pemberi beasiswa. Sasaran utama dari beasiswa yang dimaksud adalah generasi muda yang pantas diberikan bantuan (kurang mampu secara finansial) untuk melanjutkan pendidikan. Namun, hasil penelitian dari Fauzi et al. (2012) menemukan bahwa pemerintah sudah mengusulkan kebijakan beasiswa, tetapi masalahnya adalah belum meratanya penyaluran beasiswa tersebut, sehingga diperlukannya sebuah evaluasi dalam kebijakan program yang diselenggarakan pemerintah.

Berdasarkan penelitian terdahulu dari Kusumajati dan Kurniawan (2019) tentang kebijakan pemberian bantuan di pemerintah provinsi DKI Jakarta. Bantuan ini diberikan oleh BPKD dan mencakup berbagai macam biaya bantuan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dalam keseluruhan, implementasi program ini sudah terealisasi dengan optimal. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap bagian-bagian kebijakan, obyek yang akan dituju, serta lembaga yang melaksanakan program ini menyatakan bahwa masih terdapat kelemahan dan diperlukan evaluasi. Berikutnya, pada penelitian ini akan difokuskan untuk mendeskripsikan terkait pengoptimalan program-program serta komponen kebijakan pemerintah terkait pendidikan di daerah Provinsi Jawa Barat.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Herawan et al. (2023), Gubernur Provinsi Jawa Barat Ridwan Kamil memulai program sekolah gratis pada tahun 2018. Program dana BOS hanya membantu sekolah negeri, tetapi sekarang terdapat program sekolah gratis. Hal ini berdampak pada indeks Rata-rata Lama Sekolah (RLS) provinsi Jawa Barat meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa program sekolah gratis sudah optimal. Sementara itu, dalam penelitian ini akan dibahas program BOPD dan BPMU Pemerintah Provinsi Jawa Barat bertujuan untuk memajukan bidang pendidikan di Jawa Barat.

Barlian, et al., (2023) dalam penelitiannya ditunjukkan bahwa anggaran BOPD digunakan untuk menjalankan delapan Standar Nasional Pendidikan yang tidak dibiayai oleh dana BOS seperti yang tertuang pada RKAS tahun pelajaran 2022–2023. Selain itu, pemenuhan delapan standar nasional pendidikan telah menurun sebagai akibat dari penghentian Iuran Bulanan Peserta Didik (IBPD) di SMA Negeri 1 Purwakarta. Dalam penelitian ini, digunakan perspektif Ki Hadjar Dewantara untuk mendeskripsikan strategi pemerintah dalam pengoptimalan pendidikan di Jawa Barat.

Permasalahan kesejahteraan sosial yang semakin meningkat menunjukkan bahwa banyak masyarakat masih hidup dalam keadaan yang tidak stabil secara finansial (Hasna et al., 2019). Pemerintah perlu membuat strategi terbaik di bidang pendidikan, terutama bagi masyarakat yang kekurangan secara finansial, agar dapat hidup dengan sejahtera. Oleh karena itu, fungsi pemerintahan sangat diperlukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui bidang pendidikan.

Fokus penelitian ini terkait penyelenggaraan sekolah gratis yang diimplementasikan kedalam program BOPD dan BPMU Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Kemudian, penelitian ini pun akan difokuskan untuk mendeskripsikan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar. Program ini turut diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebagai instansi yang relevan dengan topik penelitian. Berdasarkan cakupan penelitian ini yaitu dampak dari adanya program BOPD dan BPMU.

Ki Hadjar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan nasional ialah pendidikan yang berakar pada budaya dan bangsanya (*cultureel-nationaal*). Lalu, pendidikan nasional ditujukan untuk kebutuhan masyarakat (*maatschappelijk*), sehingga dapat meningkatkan derajat negara dan rakyatnya. Selain itu, dengan adanya pendidikan, masyarakat dapat bekerja sama dengan negara lain untuk kesejahteraan umum (Dewantara, 2013). Pendidikan merupakan penunjang untuk sebuah negara agar dapat memiliki kompetensi dan kapabilitas sumber daya manusia dengan kualitas yang baik. Dari penumbuhan karakter serta perkembangan pengetahuan mengenai kreativitas dan inovasi akan membawa dampak baik kehidupan suatu negara. Maka dari itu, pentingnya sebuah perhatian penuh agar dapat menghasilkan sebuah perubahan yang lebih baik.

Menurut Soemendar (dalam Rohayatin, 2021) pemerintah perlu memperhatikan ketertiban, kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Peran pemerintah adalah sebagai lembaga yang perlu memperhatikan pendapat rakyat. Selanjutnya, pemerintah harus mempertimbangkan dampak lingkungan, pengaturan berbasis peraturan, peran setiap bagian masyarakat, dan komunikasi.

Peran penting yang patut pemerintah laksanakan agar terciptanya sebuah kesejahteraan bersama dalam sebuah negara perlu dititik beratkan. Hal tersebut menjadi salah satu penentu untuk dapat mencapai kesejahteraan sosial. Sementara itu, Sumber Daya Manusia (SDM) yang tepat dapat ditingkatkan dengan strategi pemerintah dalam bidang pendidikan yang tepat.

Kuswardinah (2017) menjelaskan bahwa pendapatan keluarga adalah total uang yang diterima setiap anggota keluarga dan berasal dari berbagai sumber. Penghasilan suatu keluarga terkadang menjadi sebuah acuan untuk anak-anaknya agar meneruskan jenjang pendidikan tinggi. Kemudian, akan lebih sulit membagi pendapatan bagi kalangan keluarga yang tidak memiliki pendapatan tetap seperti pekerja musiman atau buruh dan sebagainya. Maka dari itu, Pemerintah perlu menentukan strategi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, dalam penelitian ini akan dideskripsikan strategi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pengoptimalan pendidikan bagi masyarakat melalui perspektif Ki Hadjar Dewantara. Program BOPD dan BPMU

sebagai bentuk upaya pemerintah dalam pengoptimalan tersebut, serta kebijakan wajib belajar sembilan tahun yang turut diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Oleh sebab itu, pendidikan bagi masyarakat adalah komponen penting dalam kemajuan sebuah negara (Kusumajati & Kurniawan, 2019). Negara yang maju menandakan pendidikan yang maju pula.

## METODE

Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu data dikumpulkan dengan proses wawancara langsung semi terstruktur bersama narasumber yang relevan dengan topik penelitian. Metode kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang mendalam dan komprehensif untuk menjelaskan dan memahami fenomena dalam konteks alamiah (Rachman et al., 2024). Dalam penelitian ini pemerintah sebagai salah satu *stakeholder* dalam bidang pendidikan menjadi subjek pada penelitian, sedangkan objek penelitian adalah strategi pemerintah dalam bidang pendidikan di Jawa Barat.

Instrumen data pada penelitian ini adalah wawancara. Kerlinger (dalam Fadhallah, 2021) mengemukakan bahwa wawancara ialah situasi *interpersonal* di mana satu orang (*interviewer*), bertanya kepada orang yang lainnya untuk diwawancarai. Kemudian, beberapa pertanyaan yang dibuat harus berhubungan dengan masalah yang dikaji dalam penelitian. Setelah data dikumpulkan, maka proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan akan dilakukan. Selanjutnya, data dianalisis melalui berbagai proses, termasuk penyajian, komparasi, dan penyajian hasil penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara langsung yang telah dilakukan di Dinas Pendidikan Jawa Barat kepada Kepala Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 17 April, berikut ini adalah hasil penelitian dari metode pengambilan data tersebut:

**Tabel 1. Strategi Pemerintah dalam Pengoptimalan Pendidikan di Jawa Barat**

Strategi pemerintah	Temuan wawancara
Program pemerintah Jawa Barat dalam upaya pengoptimalan pendidikan	Program bantuan BOPD untuk SMA/SMK/SLB Negeri di Jawa Barat dan program BPMU untuk SMA/SMK/SLB Swasta di Jawa Barat.
Kebijakan dalam pengimplementasian program tersebut	Program ini diimplementasikan berdasarkan anggaran yang diberikan, serta untuk mendukung kebijakan wajib belajar.
Hambatan dan solusi pengimplementasian program BOPD dan BPMU	Hambatan hanya terdapat pada kurangnya anggaran untuk program ini. Solusinya adalah pemerintah pusat memberikan anggaran yang cukup untuk program ini.
Harapan dan rekomendasi	Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat berharap dapat bekerja sama dengan masyarakat dalam memperbaiki pendidikan menuju Indonesia yang lebih baik. Dalam rangka pengoptimalan pendidikan saat ini tidak akan

---

bisa diimplementasikan oleh pemerintah saja. Namun, masyarakat juga perlu turut andil untuk memajukan dunia pendidikan di masa depan.

---

### **Permasalahan Angka Partisipasi Sekolah (APS)**

Dalam upaya pengoptimalan pendidikan di Provinsi Jawa Barat diperoleh suatu permasalahan. Menurut data Angka Partisipasi Sekolah APS (2023), pada tahun 2023 minat sekolah anak-anak di Jawa Barat pada kelompok umur 16-18 ditunjukkan dengan angka 68,68%. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan minat sekolah pada kelompok umur 13-15 yang ditunjukkan dengan angka 95,75%.

Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Bab satu Pasal satu menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan program pendidikan yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Wajib belajar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat hanya sampai peserta didik berusia 15 tahun. Dengan kata lain, wajib belajar masyarakat hanya hingga jenjang SMP/Sederajat saja. Maka, terdapat beberapa pandangan masyarakat yang menganggap bahwa sekolah pada jenjang SMA/Sederajat itu tidak diperlukan. Sementara itu, pemerintah belum bisa meresmikan konsep wajib belajar 12 tahun karena beberapa alasan dan kebijakan lain yang harus dipertimbangkan.

Akar permasalahan disalurkan program BOPD dan BPMU oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah karena rendahnya minat siswa pada jenjang SMA/Sederajat untuk melanjutkan pendidikan. Menurut narasumber, minat siswa dalam melanjutkan pendidikan belum sampai sembilan tahun. Minat siswa dalam melanjutkan pendidikan hanya baru sampai 8,5 tahun, artinya banyak siswa SMP yang memutuskan berhenti sekolah pada kelas dua SMP. Kemudian, terdapat ketetapan pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 47 tahun 2008 wajib belajar yang mengatur masyarakat untuk menamatkan jenjang SMP. Hal ini merupakan alasan pemerintah pusat belum bisa mengeluarkan kebijakan wajib belajar 12 Tahun. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, mengharapkan masyarakat setidaknya mendapatkan pendidikan hingga jenjang SMA/Sederajat. Maka, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menginisiasi program BOPD dan BPMU sehingga dapat membantu biaya operasional sekolah siswa.

### **Strategi Pemerintah dalam Pengoptimalan Pendidikan di Jawa Barat**

Pemerintah pusat memberikan empat macam bantuan pendidikan untuk satuan pendidikan SMA/SMK/SLB yaitu: BOS Pusat, DAK Fisik Sarpras, Bantuan Pemerintah Sarpras, dan PIP. Pemerintah Provinsi memberikan bantuan program BOPD dan BPMU untuk jenjang SMA/SMK/SLB sebagai upaya untuk pengoptimalan pendidikan pada jenjang SMA/SMK/SLB. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga turut mengimplementasikan kebijakan wajib belajar sembilan tahun seperti ketetapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 47 tahun 2008 tentang wajib belajar.

#### **a. Program BOPD**

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD). Tujuan dari adanya program ini adalah untuk

mengoptimalkan peran Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam bidang pendidikan, sehingga dapat menjamin ketersediaan biaya untuk terselenggaranya sebuah layanan pendidikan berkualitas tinggi. BOPD ditransfer langsung ke rekening satuan pendidikan dan didistribusikan secara bertahap berdasarkan laporan pertanggungjawaban (Barlian et al., 2023). Program BOPD adalah sebuah program untuk membantu biaya operasional sekolah siswa agar siswa di jenjang SMA/SMK/SLB Negeri dapat sekolah secara gratis. Anggaran ini diberikan kepada sekolah, lalu untuk setiap siswa diberikan Rp145 ribu sampai dengan Rp160 ribu dalam satu bulannya. Total dana yang dianggarkan pemerintah pusat kepada pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk menyukseskan program ini adalah sebesar Rp1,4 triliun. Total keseluruhan dana ini sudah disalurkan untuk seluruh sekolah jenjang SMA/SMK/SLB Negeri yang terdapat di Provinsi Jawa Barat. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengimplementasikan program BOPD ini mengacu kepada anggaran yang diberikan. Menurut narasumber, kebijakan tanpa anggaran tidak bisa diimplementasikan. Ketika anggaran sudah diberikan oleh pemerintah pusat, selanjutnya Pemerintah Provinsi akan langsung mendata sekolah dan mulai menyalurkan tiap-tiap anggaran tersebut. Kemudian, pihak internal Pemerintah Provinsi akan mengeluarkan teknis pelaksanaan terkait penyaluran anggaran tersebut.

Dalam pengimplementasian program BOPD sudah optimal. Seluruh sekolah pada jenjang SMA/SMK/SLB Negeri di Jawa Barat sudah mendapatkan anggaran ini secara merata, tercatat 850 sekolah sudah mendapatkan bantuan ini. Kebutuhan anggaran tiap sekolah berbeda, namun pemerintah memberikan anggaran ini kepada setiap sekolah dengan jumlah yang sama. Maka dari itu, program ini masih memerlukan evaluasi agar lebih baik (Sudrajat, 2021).

Dampak dari adanya program BOPD yang diluncurkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini adalah terjadinya kenaikan jumlah peserta didik SMA/SMK/SLB Negeri. Rata-rata kenaikan jumlah siswa jenjang SMA/Sederajat di Jawa Barat per tahunnya adalah sekitar 400 siswa. Dalam hal ini, program BOPD merupakan program yang berhasil dan memiliki dampak yang baik setelah diimplementasikan. Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan pengoptimalan pendidikan bagi masyarakat. Kemudian, pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan kebijakan program Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD). Kebijakan ini menghentikan pungutan luran Bulanan Peserta Didik (IBPD). Hal ini yang membuat beberapa sekolah menengah menanggung kesulitan untuk membayar biaya operasional sekolah mereka (Barlian et al., 2023).

#### **b. Program BPMU**

Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) adalah suatu upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pengoptimalan pendidikan. Upaya tersebut dilakukan dengan menawarkan bantuan kepada sekolah dan madrasah. Program BPMU sudah terealisasi sejak tahun 2021 hingga saat ini. Tujuan dari adanya program bantuan ini yaitu untuk memenuhi biaya operasional mereka dan memberikan layanan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas (Junaedi, 2018). Program ini merupakan program yang mendukung terselenggaranya kebijakan wajib belajar sembilan tahun. Sementara itu,

program ini merupakan amanah dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 47 tahun 2008 tentang wajib belajar.

Program Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) bertujuan untuk membantu biaya operasional sekolah siswa di jenjang SMA/SMK/SLB swasta di Jawa Barat. Besaran dana hibah BPMU diukur berdasarkan jumlah peserta didik. Maka, satuan biaya program ini sebesar Rp580 ribu per orang dalam satu tahun anggaran (Junaedi, 2018). Total anggaran BPMU untuk biaya operasional siswa di Jawa Barat mencapai Rp890,8 juta. Selain itu, peserta didik juga mendapat bantuan Rp2 juta pada awal masuk sekolah sebagai biaya untuk meringankan uang pangkal. Program BPMU sudah diimplementasikan ke seluruh sekolah jenjang SMA/SMK/SLB swasta di Jawa Barat, kecuali sekolah-sekolah yang menolak untuk menerima program bantuan ini. Dampak dari adanya program ini yaitu mengurangi risiko putus sekolah bagi para pelajar jenjang tersebut di Jawa Barat.

Program BPMU Provinsi Jawa Barat juga masih memiliki permasalahan seperti kekurangan anggaran yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi. Kemudian, program ini belum mencakup biaya personal siswa secara keseluruhan. Dalam kata lain, sekolah jenjang SMA/Sederajat di swasta tetap membayar SPP. Namun, dengan adanya program ini pemerintah berupaya untuk meringankan biaya sekolah peserta didik pada jenjang tersebut di swasta. Program BPMU yang diberikan kepada peserta didik pada jenjang sekolah SMA/Sederajat di swasta tidak termasuk anggaran untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Selanjutnya, lembaga pendidikan harus memiliki kemampuan untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengaktualisasikan, dan mengawasi pembiayaan pendidikan. Dalam manajemen pembiayaan pendidikan, hal ini merupakan suatu masalah penting yang perlu diperhatikan. Ini diperlukan agar sekolah dapat beroperasi sesuai dengan sistem dan menghasilkan lulusan yang kompetitif (Junaedi, 2018).

Narasumber menyebutkan bahwa hambatan dalam mengimplementasikan program BPMU di Jawa Barat hampir tidak ada. Namun, terdapat beberapa sekolah yang menolak bantuan program ini karena merasa sudah mencukupi. Selain itu, masih ada paradigma di masyarakat yang meremehkan pentingnya pendidikan tinggi dan menganggapnya hanya sebagai sebatas pengeluaran saja. Oleh karena itu, sudah seharusnya pemerintah tidak hanya memberikan bantuan biaya finansial kepada masyarakat. Selanjutnya, pemerintah juga memberikan pengarahannya bahwa pendidikan merupakan sebuah investasi. Surahman (2021) menjelaskan bahwa kondisi sosial ekonomi sangat beragam. Sebagai contoh, banyak orang tua dengan kemampuan finansial menengah ke bawah, tetapi ada juga beberapa orang tua dengan kemampuan finansial menengah ke atas. Oleh sebab itu, hal tersebut menjadi sebuah hambatan dalam pelaksanaan program BPMU.

Dampak dari program BPMU yaitu setiap pelajar pada jenjang SMA/SMK/SLB Swasta di Jawa Barat mendapatkan keringanan biaya operasional sekolah. Namun, belum seluruh biaya pendidikan sekolah jenjang SMA/Sederajat di swasta menjadi gratis. Kemudian, dengan adanya program bantuan ini pemerintah pusat dapat lebih cepat merealisasikan wajib belajar 12 tahun.

Indikator untuk mengukur sejauh mana keberhasilan dari program BPMU dapat dinilai melalui ketersediaan bantuan yang disalurkan kepada setiap sekolah oleh pemerintah. Pada umumnya, setiap sekolah pasti telah mempunyai Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) masing-masing. Namun, masih ada sekolah swasta yang menolak atau hanya menggunakan sedikit dari anggaran tersebut. Selain itu, Kesuksesan program BPMU dapat diukur melalui perencanaan, aktualisasi, pengorganisasian, pengawasan dan pengendalian, penyerapan anggaran, pembiayaan pendidikan, dan perubahan perilaku siswa. Prestasi sekolah dalam hal akademik maupun non akademik juga dapat menjadi indikator keberhasilan (Junaedi, 2018).

Faktor sosial dan budaya juga mempengaruhi upaya pengoptimalan pendidikan, karena dua hal tersebut memiliki keterkaitan dengan kehidupan sehari-hari individu. Misalnya, lingkungan sosial yang memiliki tingkat pendidikan cenderung rendah, sehingga mengakibatkan menurunnya motivasi masyarakat dalam melanjutkan pendidikan. Kemudian, sebaliknya saat berada di lingkungan yang cenderung berpendidikan tinggi, akan mendorong seseorang untuk terus melanjutkan pendidikan yang tinggi pula. Sementara itu, budaya yang ada akan membantu pembudayaan terjadi dalam proses pendidikan, sehingga pendidikan juga harus mempertimbangkan nilai-nilai budaya (Syamsidar, 2015).

**c. Keterkaitan Wajib Belajar dengan Program BOPD dan BPMU**

Kebijakan pemerintah daerah yang dilakukan merujuk pada undang-undang yang berlaku. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 pasal 46 ayat dua menjelaskan bahwa pemerintah, dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan, sesuai dengan peraturan wajib belajar sembilan tahun yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar. Dalam hal ini program BOPD dan BPMU merupakan program bantuan yang dianggarkan pemerintah pusat kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membantu meningkatkan kualitas pendidikan. Program ini berupaya untuk meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada jenjang SMA/Sederajat di Jawa Barat. Selain itu, pemerintah ingin meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) terutama di Jawa Barat.

Pemerintah belum mengeluarkan peraturan terkait wajib belajar 12 tahun. Namun, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menginisiasi program ini dengan harapan masyarakat dapat menempuh pendidikan hingga jenjang SMA/Sederajat. Oleh sebab itu, pemerintah terus berupaya memperbaiki dan mengevaluasi setiap program agar dapat tepat sasaran.

**d. Analisis program BOPD dan BPMU terhadap Perspektif Ki Hadjar Dewantara**

Menurut Ki Hadjar Dewantara, beasiswa merupakan upaya pemerintah dalam membantu masyarakat melanjutkan pendidikan. Ki Hadjar Dewantara menyebutkan bahwa badan bantuan atau dalam hal ini pihak pemerintah sudah seharusnya bertindak sebagai penyedia beasiswa. Beasiswa yang diberikan terutama untuk generasi muda yang pantas mendapatkan bantuan untuk melanjutkan pendidikan (Dewantara, 2013). Namun, terkadang ada peserta didik yang memiliki potensi tetapi terkendala secara

finansial. Oleh sebab itu, di bidang pendidikan peran pemerintah sangat diperlukan untuk pengoptimalan pendidikan, terutama di Jawa Barat, sesuai dengan topik penelitian ini.

Program BOPD dan BPMU sebagai bentuk upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mewujudkan konsep Trisentra Pendidikan. Trisentra Pendidikan merupakan konsep pemikiran yang dicetuskan Ki Hadjar Dewantara. Pemerintah Indonesia juga memperkenalkan konsep Trisentra Pendidikan, yang terdiri dari tiga pilar utama pendidikan: guru, siswa, dan kurikulum. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya ketiga pilar tersebut untuk memastikan bahwa pendidikan yang berkualitas tinggi dapat diberikan (Kurniawaty dan Widayatmo, 2023).

Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah menerapkan konsep beasiswa sesuai dengan pandangan Ki Hadjar Dewantara. Beasiswa menurut Ki Hadjar Dewantara yaitu memberikan sebuah bantuan pendidikan kepada masyarakat, terutama yang kurang mampu secara finansial (Dewantara, 2013). Namun, pada implementasinya masyarakat yang tergolong mampu juga mendapatkan program bantuan BOPD dan BPMU ini dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namun, hal ini tetap sesuai karena tujuan beasiswa yang dimaksud oleh Ki Hadjar Dewantara adalah untuk membantu masyarakat kurang mampu. Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun dalam program BOPD dan BOMU sudah memberikan bantuan pendidikan kepada masyarakat kurang mampu. Kemudian, tidak semua hal yang terkait dengan program BOPD dan BPMU sudah optimal karena masih ada beberapa indikator dalam program ini yang perlu di evaluasi. Secara umum, dalam penelitian ini program BOPD dan BPMU yang diimplementasikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah sesuai dengan konsep beasiswa menurut Ki Hadjar Dewantara.

#### **e. Harapan terhadap Program BOPD dan BPMU**

Program BOPD dan BPMU belum mencapai tingkat keunggulan yang optimal dan masih memerlukan evaluasi. Sementara itu, evaluasi yang dimaksud adalah dalam hal keefektifan maupun kesesuaian dengan implementasi di masyarakat Jawa Barat. "Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat berharap dapat bekerja sama dengan masyarakat dalam memperbaiki pendidikan menuju Indonesia yang lebih baik" ungkap narasumber. Dalam rangka pengoptimalan pendidikan saat ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja. Namun, perlu adanya peran masyarakat untuk memajukan dunia pendidikan di masa depan. Kedepannya, lembaga pemerintah sedang mempersiapkan sebuah program yang bertujuan untuk membiayai siswa yang besekolah di SMA/Sederajat Negeri ataupun Swasta. Nama program ini adalah P3KE yang bertujuan sebagai upaya menghadapi permasalahan kemiskinan ekstrem.

### **SIMPULAN**

Pemerintah Provinsi Jawa Barat meluncurkan Program BOPD dan BPMU untuk jenjang SMA/SMK/SLB. Tujuan pemberian program bantuan ini adalah untuk membiayai operasional sekolah peserta didik, walaupun penyaluran anggaran dari kedua program ini berbeda. Program bantuan ini juga sudah dianggarkan secara merata ke seluruh sekolah SMA/SMK/SLB di Jawa Barat. Kemudian, program ini sudah optimal dan sesuai dengan konsep beasiswa menurut Ki Hadjar Dewantara. Program ini disalurkan untuk semua kalangan, baik yang mampu atau tidak secara finansial. Dampak yang ditimbulkan dari

adanya program bantuan BOPD dan BPMU yaitu terjadi kenaikan jumlah siswa pada jenjang SMA/Sederajat setiap tahunnya.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Firman Oktora, S.Si., M.Pd., M.Kom. sebagai Kepala Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dinas Pendidikan Jawa Barat karena sudah berkenan untuk menjadi narasumber dan memberikan informasi terkait topik penelitian ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Buyung Firmansyah, S.Pd., M.Pd. sebagai dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Pendidikan Indonesia dan Cepri Maulana, S.Pd., M.Pd. sebagai dosen pembimbing dalam penelitian ini, serta pihak-pihak terkait yang sudah turut andil dalam proses penelitian ini.

### DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, D. H., Amin, F., & Samsuruhuda, H. 2019. Efektivitas Program Beasiswa Bidikmisi di Universitas Negeri Surabaya. *Didaktis: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan*, 19(3), 240-265
- Badan Pusat Statistika. 2024. *Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Provinsi, 2021-2023*. Diakses dari <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzAxIzI=/school-enrolment-rate--ser--by-province.html>
- Badan Pusat Statistika. 2023. *Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribu Jiwa), 2022-2023*. Diakses dari <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html>
- Barlian, U. C., Erawan, R. D. T., Ardiana, L., & Yuniawati. 2023. Analisis Kebijakan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di SMA Negeri 1 Purwakarta. *Jurnal Penelitian Multi Disiplin*, 1(8), 832-837
- Dewantara, K. H. 2013. *Ki Hadjar Dewantara pemikiran, konsepsi, keteladanan, sikap merdeka. II, Kebudayaan*. Yogyakarta: Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST-Press)
- Fadhallah. 2021. *Wawancara*. Jakarta: UNJ Press
- Fauzi, A., Kadir, A. G., & Murfhi, A. 2012. Analisis Peranan Pemerintah Daerah terhadap Anak Putus Sekolah di Kabupaten Wajo. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(8), 85–96
- Hasna, N. M., Nugraha, N., & Mustikarini, I. D. 2019. Analisis Dampak Pemberian Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7(2), 108–116
- Herawan, N., Putri, S., Julianti, S., & Ariesmansyah, A. 2023. Collaborative Governance Dalam Upaya Peningkatan Indeks Mutu Pendidikan di Jawa Barat Melalui Program Sekolah Gratis. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(7), 324-333
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar
- Junaedi, E., & Enas. 2018. Manajemen Pembiayaan Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) dalam Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan. *Indonesian Journal of Education Management and Administration Review*, 2(1), 184-188

- Kurniawati, J. B., & Widyatmo, S. 2023. Permasalahan Trisentra Pendidikan dalam Penanaman Nilai-Nilai Pancasila di Era Teknologi 5.0. *Jagaddhita: Jurnal Kebhinekaan dan Wawasan Kebangsaan*, 2(2), 33-45
- Kusumajati, & Kurniawan, T. 2019. Analisis Implementasi Kebijakan Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 9(2), 166–176
- Kuswardinah, A. 2017. *Ilmu Kesejahteraan Keluarga*. Semarang: Unnes Pres
- Margiyanti, I., & Maulia, S., T. 2023. Kebijakan Pendidikan Implementasi Program Wajib Belajar 12 Tahun. *Jurnal Pendidikan Dan Sastra Inggris*, 3(1), 199–208
- Rachman, A., Yochanan, E., Samanlangi, A. I., & Purnomo, H. 2024. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Karawang: CV Saba Jaya Publisher
- Ramadhon, R., Jaenudin, R., & Fatimah, S. 2017. Pengaruh Beasiswa Terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Sriwijaya. *Jurnal Profit*, 4(2), 203-213
- Rohayatin, T. 2021. *Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan*. Yogyakarta: Deepublish
- Santika, I. G. N. 2021. Grand Desain Kebijakan Strategis Pemerintah dalam Bidang Pendidikan untuk Menghadapi Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Education and Development*, 9(2), 369–377
- Sudrajat, A. (2021, 10 Desember). “Jawa Barat salurkan Rp1,4 triliun untuk iuran bulanan gratis SMAN/SMKN/SLBN”. *Antara Jabar*
- Surahman, S. 2021. *Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Jangan Karena Mahal Sekolah Batal*. Boyolali: Estu Utama Press
- Syamsidar. 2015. Dampak Perubahan Sosial Budaya terhadap Pendidikan. *Al-Irsyad Al-Nafs: Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 2(1), 99-108